PADAIDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN 3048-1821 (Online - Elektronik)
Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2026
Publisher: P3M Politeknik Pariwisata Makassar
Available online: http://journal.poltekparmakassar.ac.id/index.php/padaidi

Pendampingan Pengelolaan Event Hospitality Berbasis Nilai Publik di Desa Wisata Salluallo, Tana Toraja

Wim Johannes Winowatan[1], I Nyoman Siryayasa[2], Abdi[3]*
[123]Politeknik Pariwisata Makassar, Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan 90224
Corresponding Author: wimjohaneswinowatan@poltekparmakassar.ac.id

Received: 09 Juli, 2026	Accepted: 21 September , 2026	Published: 13 November, 2026

Abstract
Salluallo Tourism Village in Tana Toraja Regency has cultural, natural, and hospitality tourism potential, yet its management faces challenges related to human-resource capacity, stakeholder coordination, accessibility, and the distribution of economic benefits. This article describes the need for mentoring in public-value-based hospitality event management and the challenges of public-policy implementation in the village. The community-service approach combined lectures, participatory discussions, practical exercises, mentoring, interviews with local stakeholders, and evaluative reflection. Field information in the source report indicates that the tourism-awareness group (Pokdarwis) manages local weaving tourism, Tongkonan houses, and community homestays, while several attractions and supporting facilities are managed by a Catholic foundation in the Sa'pa Bayo-Bayo area. The absence of formal cooperation among the village government, Pokdarwis, and the area manager limits coordination and the distribution of benefits. Mentoring should therefore focus on event-management capacity, institutional strengthening, digital promotion, accessibility, and partnership facilitation. Public-value-based hospitality events may broaden economic benefits, strengthen social participation, and support cultural preservation when backed by formal collaboration and sustained follow-up. The findings are descriptive and qualitative; the source document does not report quantitative measures of changes in participant capacity.
Keywords: *hospitality events; public value; mentoring; tourism village; Salluallo; public policy*

Abstrak
Desa Wisata Salluallo di Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi wisata budaya, alam, dan hospitality, tetapi pengelolaannya menghadapi kendala kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarpemangku kepentingan, aksesibilitas, dan pemerataan manfaat ekonomi. Artikel ini mendeskripsikan kebutuhan pendampingan pengelolaan event hospitality berbasis nilai publik serta tantangan implementasi kebijakan publik di desa wisata tersebut. Kegiatan menggunakan pendekatan pengabdian partisipatif melalui ceramah, diskusi, praktik, pendampingan, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, dan refleksi evaluatif. Informasi lapangan dalam dokumen kegiatan menunjukkan bahwa Pokdarwis mengelola wisata tenun, Tongkonan, dan homestay warga, sedangkan sejumlah atraksi dan fasilitas pendukung berada di bawah pengelolaan Yayasan Katolik pada kawasan Sa'pa Bayo-Bayo. Belum adanya kerja sama formal antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan pengelola kawasan menyebabkan koordinasi serta distribusi manfaat belum optimal. Pendampingan karena itu perlu berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan event, penguatan kelembagaan, promosi digital, perbaikan aksesibilitas, dan fasilitasi kemitraan. Pengelolaan event hospitality berbasis nilai publik berpotensi memperluas manfaat ekonomi, memperkuat partisipasi sosial, dan melestarikan budaya lokal apabila ditopang kolaborasi formal dan tindak lanjut berkelanjutan. Temuan ini bersifat deskriptif-kualitatif; dokumen sumber tidak menyajikan ukuran kuantitatif perubahan kapasitas peserta.
Kata Kunci: event hospitality; nilai publik; pendampingan; desa wisata; Salluallo; kebijakan publik

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kunjungan dan pendapatan, tetapi juga untuk memperluas partisipasi masyarakat serta menjaga keberlanjutan budaya lokal. Desa wisata menjadi ruang penting bagi keterhubungan antara kebijakan publik, pengelolaan destinasi, dan pemberdayaan komunitas. Di Desa Wisata Salluallo, Tana Toraja, potensi wisata mencakup kerajinan tenun, rumah adat Tongkonan, budaya Toraja, wisata alam dan rohani, serta homestay berbasis rumah warga.

Event hospitality—termasuk penyambutan tamu, kegiatan budaya, dan acara berbasis komunitas—dapat menjadi sarana untuk menghadirkan pengalaman wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Namun, pengelolaan event membutuhkan kapasitas perencanaan, pembagian peran, pelayanan, promosi, dan evaluasi, serta koordinasi yang memadai di antara pemangku kepentingan.

Dokumen kegiatan mengidentifikasi tantangan kelembagaan di Salluallo. Pokdarwis mengelola wisata tenun, Tongkonan, dan homestay masyarakat, sementara sejumlah atraksi dan fasilitas pendukung di kawasan Sa'pa Bayo-Bayo dikelola oleh Yayasan Katolik. Keterbatasan akses jalan dan belum adanya nota kesepahaman atau mekanisme kemitraan formal turut menghambat pengelolaan terpadu. Keadaan tersebut berpotensi membatasi keterlibatan warga dan pemerataan manfaat pariwisata.

Dalam kerangka nilai publik, keberhasilan pengelolaan destinasi tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, melainkan dari manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, artikel ini membahas (1) tantangan proses pendampingan dan implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan event hospitality di Desa Wisata Salluallo, serta (2) peluang pendampingan dalam mendorong penciptaan nilai publik.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Metode

Artikel ini disusun berdasarkan dokumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 berjudul "Pendampingan Pengelolaan Event Hospitality Berbasis Nilai Publik di Desa Wisata Salluallo, Tana Toraja". Pendekatan yang dilaporkan dalam dokumen adalah ceramah (lecturing), diskusi partisipatif, praktik dan pendampingan langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, serta evaluasi reflektif.

Materi pendampingan meliputi konsep event hospitality, kebijakan publik, nilai publik, pengelolaan event profesional dan berkelanjutan, peran masyarakat dalam community-based tourism, pembagian tugas pemangku kepentingan, alur kegiatan, standar operasional sederhana, promosi event, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Evaluasi direncanakan melalui penilaian rancangan dan praktik event, observasi partisipasi, serta diskusi untuk mengidentifikasi kendala dan solusi.

Informasi lapangan dalam laporan mencakup wawancara dengan Kepala Lembang Salluallo, Ibrahim Ada'; Ketua Pokdarwis, Syrilus T. Tandioga; serta informan lain yang disebut sebagai Bapak Yan dan Bapak Marthen. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan pada kapasitas lokal, koordinasi kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, aksesibilitas, promosi, dan dimensi nilai publik. Pengambilan data diambil dan dilakukan dua kali kunjungan pada tanggal 24 juli 2026 dan 14 september 2026 yang mana langsung bertemu dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

2.2 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Wisata Salluallo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Lokasi pendampingan mencakup area permukiman dan potensi wisata masyarakat serta kawasan Sa'pa Bayo-Bayo.

2.3 Waktu Pelaksanaan

Pengumpulan informasi dan kunjungan lapangan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada 24 Juli 2026 dan 14 September 2026. Kedua kunjungan melibatkan pertemuan langsung dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

2.4 Materi dan Identitas Peserta

Materi pendampingan meliputi konsep event hospitality, kebijakan publik, nilai publik, pengelolaan event profesional dan berkelanjutan, community-based tourism, pembagian tugas pemangku kepentingan, alur kegiatan, standar operasional sederhana, promosi event, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Informan yang disebut dalam laporan adalah Kepala Lembang Salluallo, Ibrahim Ada'; Ketua Pokdarwis, Syrilus T. Tandioga; serta informan lain yang disebut sebagai Bapak Yan dan Bapak Marthen. Jumlah peserta dan rincian karakteristik peserta tidak dicantumkan dalam manuskrip sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi dan kondisi pengelolaan destinasi

Salluallo memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk wisata dan bahan perancangan event, termasuk tenun khas setempat, Tongkonan, budaya Toraja, wisata alam dan rohani, serta homestay milik masyarakat. Pokdarwis menjadi aktor utama untuk produk wisata yang dikelola langsung warga. Namun, beberapa atraksi dan fasilitas pendukung—antara lain aula, restoran, dan akomodasi non-homestay—berada dalam pengelolaan Yayasan Katolik di kawasan Sa'pa Bayo-Bayo.

Pembagian pengelolaan tersebut belum ditopang kerja sama formal antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan pihak yayasan. Akibatnya, produk wisata belum terintegrasi dalam satu sistem yang melibatkan masyarakat secara luas. Warga dilaporkan memperoleh manfaat langsung yang terbatas, antara lain melalui jasa parkir, sedangkan peluang keterlibatan dalam aktivitas wisata lain masih perlu diperluas. Informasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan ketiadaan potensi, melainkan tata kelola, akses terhadap fasilitas, dan pembagian manfaat. Berikut area dan fasilitas yang ada pada Desa Wisata Saluallo



Gambar 1. Area Tongkonan Desa Wisata Salluallo
Sumber: Olah data peneliti, 2026

3.2 Kapasitas pengelolaan event dan kebutuhan pendampingan

Pendampingan diarahkan untuk membantu masyarakat menyusun rencana event berbasis potensi lokal, menentukan peran pemangku kepentingan, merancang alur acara, meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, memasukkan unsur budaya lokal, menyusun SOP sederhana, memperkuat promosi, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Kebutuhan tersebut relevan karena pengelolaan event terpadu menuntut koordinasi dan kemampuan teknis yang melampaui pengelolaan satu produk wisata.

Kepala Lembang Salluallo, Ibrahim Ada', menyampaikan bahwa masyarakat ingin berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata, tetapi ruang keterlibatannya masih terbatas. Ketua Pokdarwis, Syrilus T. Tandioga, juga menjelaskan bahwa pengembangan program wisata dan event terkendala karena sejumlah fasilitas pendukung dikelola pihak lain. Keterangan ini memperlihatkan bahwa pendampingan harus berjalan bersamaan dengan upaya membuka ruang pengambilan keputusan bagi masyarakat. Transfer pengetahuan saja tidak cukup jika akses terhadap sumber daya dan kewenangan tetap terbatas. Berikut salah satubukti pendampingan yang dilakukan di area Desa Wisata Saluallo



Gambar 2. Pendampingan di Desa Wisata Salluallo
Sumber: Olah data peneliti, 2026

3.3 Koordinasi dan implementasi kebijakan publik

Temuan menunjukkan perlunya forum komunikasi yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Lembang Salluallo, Pokdarwis, dan Yayasan Katolik sebagai pengelola kawasan Sa'pa Bayo-Bayo. Kesepakatan formal diperlukan untuk memperjelas pembagian peran, akses pemanfaatan fasilitas, tanggung jawab penyelenggaraan event, serta mekanisme distribusi manfaat. Tanpa pengaturan tersebut, masing-masing aktor berisiko bekerja berdasarkan kewenangan sendiri sehingga produk dan promosi destinasi tidak terintegrasi.

Dalam kerangka implementasi kebijakan, persoalan ini berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta struktur pelaksanaan. Keterbatasan akses jalan yang dilaporkan juga membatasi mobilitas pengunjung dan potensi penyelenggaraan event berskala lebih besar. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola perlu dilengkapi advokasi infrastruktur dan pengaturan kolaborasi, bukan diperlakukan sebagai intervensi yang berdiri sendiri.

Implementasi kebijakan melibatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka Edward III yang digunakan dalam dokumen sumber membantu membaca kendala implementasi, sedangkan konteks lokal dan hubungan antaraktor turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Hill & Hupe, 2021; Howlett et al., 2020). Pada Salluallo,

pembagian pengelolaan dan belum adanya kerja sama formal menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi lintas lembaga.

3.4 Bauran pemasaran dan integrasi produk wisata

Pembacaan bauran pemasaran 4P dalam dokumen sumber memperlihatkan empat isu. Dari sisi product, potensi wisata beragam tetapi belum terintegrasi. Dari sisi price, belum ada sistem pembagian manfaat ekonomi yang terstruktur antara pengelola kawasan dan masyarakat. Dari sisi place, aksesibilitas terbatas dan pengelolaan destinasi belum terhubung. Dari sisi promotion, website desa wisata dan promosi digital masih perlu diperbarui. Keempat aspek ini saling berkaitan: promosi yang lebih kuat perlu diikuti produk yang jelas, akses yang memadai, dan tata kelola manfaat yang disepakati.

Tindak lanjut yang disarankan adalah mengembangkan model inkubator desa wisata dengan dukungan perguruan tinggi, mahasiswa magang, praktisi, aparatur pemerintah, dan pemerintah daerah. Dukungan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan event, kelembagaan Pokdarwis, pemasaran digital, dan pengembangan produk wisata berbasis masyarakat.

3.5 Penciptaan nilai publik: ekonomi, sosial, dan budaya

Dimensi ekonomi berkaitan dengan peluang masyarakat memperoleh pendapatan melalui tenun, homestay, jasa wisata, dan keterlibatan dalam event. Saat ini manfaat ekonomi dinilai belum optimal karena sebagian kegiatan dan fasilitas berada di bawah pengelolaan pihak lain. Kemitraan yang transparan dapat membuka peluang bagi warga untuk menyediakan produk, jasa, konsumsi, pertunjukan, pemanduan, dan layanan pendukung, sepanjang disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Dimensi sosial meliputi partisipasi, rasa memiliki terhadap destinasi, kerja sama, dan kohesi komunitas. Pelibatan warga dalam perencanaan dan evaluasi event dapat meningkatkan keterbukaan pengambilan keputusan dan memperkuat tanggung jawab bersama. Dimensi budaya mencakup penggunaan tenun, Tongkonan, tradisi Toraja, dan kearifan lokal sebagai unsur pengalaman wisata yang edukatif. Pengemasan budaya perlu dilakukan dengan menghormati nilai, batasan, dan kepemilikan budaya komunitas.

Penting dicatat bahwa dokumen kegiatan menggambarkan manfaat tersebut terutama sebagai peluang dan arah yang diharapkan dari pendampingan; belum disajikan data kuantitatif yang membuktikan peningkatan pendapatan atau perubahan kapasitas sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh sebab itu, evaluasi berikutnya sebaiknya mencatat indikator yang terukur, seperti jumlah warga yang terlibat, jumlah usaha lokal yang memperoleh pesanan, kesepakatan kemitraan yang terbentuk, jumlah event yang dikelola bersama, dan persepsi masyarakat terhadap distribusi manfaat.

Dalam perspektif pemberdayaan, pendampingan perlu menempatkan warga sebagai subjek yang terlibat dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (Chambers, 1997; Ife, 2013). Event hospitality menghubungkan pengelolaan kegiatan dengan kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung; manfaat event budaya bergantung pada kualitas pengelolaan dan kolaborasi pemangku kepentingan (Getz, 2012; Richards, 2021). Sementara itu, nilai publik mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang tercipta melalui kolaborasi (Moore, 1995; Bryson et al., 2017).

Dengan demikian, pendampingan tidak cukup dipahami sebagai transfer pengetahuan teknis. Penguatan kapasitas harus berjalan bersama pembukaan akses terhadap sumber daya, ruang pengambilan keputusan, kemitraan formal, dan mekanisme distribusi manfaat. Temuan yang

tersedia masih bersifat deskriptif-kualitatif; manuskrip sumber tidak menyajikan ukuran kuantitatif perubahan kapasitas, pendapatan, atau dampak sebelum dan sesudah kegiatan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan event hospitality berbasis nilai publik di Desa Wisata Salluallo menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas pengelolaan event secara terpadu, koordinasi antarpemangku kepentingan yang belum optimal, aksesibilitas yang terbatas, promosi digital yang perlu diperkuat, dan belum adanya kerja sama formal antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan Yayasan Katolik sebagai pengelola kawasan Sa'pa Bayo-Bayo. Kondisi tersebut membatasi integrasi produk wisata serta peluang masyarakat untuk memperoleh manfaat secara lebih merata.

Pendampingan berpotensi memperkuat kapasitas perencanaan dan pelaksanaan event, meningkatkan kualitas hospitality, mengembangkan promosi, dan mengintegrasikan potensi budaya lokal. Agar potensi tersebut menghasilkan nilai publik, pendampingan perlu disertai kemitraan formal, pembagian peran dan manfaat yang transparan, dukungan aksesibilitas, dan tindak lanjut yang terukur. Nilai publik dalam konteks ini mencakup peluang ekonomi, partisipasi dan kohesi sosial, serta pelestarian budaya. Kesimpulan mengenai dampak pendampingan masih bersifat kualitatif karena laporan sumber tidak memuat pengukuran kuantitatif perubahan.

Tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi fasilitasi penyusunan MoU antara pemerintah daerah, Pemerintah Lembang Salluallo, Pokdarwis, dan pengelola kawasan Sa'pa Bayo-Bayo; pendampingan berkelanjutan melalui model inkubator desa wisata; perbaikan akses jalan, penunjuk arah, informasi wisata, dan fasilitas parkir; pembaruan website serta kanal media sosial; dan pemantauan dengan indikator yang melibatkan masyarakat. Indikator evaluasi dapat mencakup jumlah warga yang terlibat, usaha lokal yang memperoleh pesanan, kesepakatan kemitraan, event yang dikelola bersama, serta persepsi masyarakat mengenai distribusi manfaat.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Wisata Salluallo, Kepala Lembang Salluallo, pengurus Pokdarwis, para informan, serta pihak-pihak yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Nama lembaga pendukung dan bentuk dukungan spesifik dapat ditambahkan sesuai dokumen administrasi kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Addawiyah, R., Pratama, A., & Nugroho, S. (2024). Policy implementation effectiveness in tourism sector: A stakeholder perspective. Journal of Public Administration Studies, 12(2), 145–160.

Anisya, D. (2023). Public policy dynamics in developing countries: A governance perspective. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(1), 33–47.

Benington, J. (2019). Public value: Theory and practice. Public Administration Review, 79(2), 234–245.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.

Brotherton, B. (2020). Hospitality management and organizational behavior. International Journal of Hospitality Management, 87, 102489.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance: Moving beyond traditional public administration. Public Administration Review, 77(5), 640–650.

Cairney, P. (2020). Understanding public policy: Theories and issues. Policy Press.
Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Fauzan, A. (2024). Implementation of public policy in local tourism development. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 55–70.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.
Getz, D. (2012). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Routledge.
Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7(4), 1–15.
Hall, C. M. (2020). Tourism planning and public policy. Tourism Review, 75(1), 15–27.
Hartley, J., Alford, J., Hughes, O., & Yates, S. (2021). Public value and public administration. International Journal of Public Administration, 44(10), 1–14.
Hill, M., & Hupe, P. (2021). Implementing public policy (4th ed.). Sage Publications.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying public policy: Policy cycles and subsystems (4th ed.). Oxford University Press.
Ife, J. (2013). Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice. Cambridge University Press.
Kim, J., Lee, C., & Kim, H. (2022). Event quality and tourist experience. Journal of Travel Research, 61(3), 567–582.
Lane, B., & Kastenholz, E. (2019). Rural tourism: New concepts and developments. Journal of Sustainable Tourism, 27(8), 1137–1155.
Lashley, C. (2018). Hospitality and hospitableness. International Journal of Hospitality Management, 72, 1–8.
Mair, J., & Weber, K. (2019). Event sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 27(8), 1200–1217.
Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
Nugroho, L. (2023). Community-based tourism and public value creation. Jurnal Pariwisata Indonesia, 18(2), 101–115.
Pratama, R. (2022). Challenges in tourism policy implementation in Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 28(3), 211–225.
Richards, G. (2021). Rethinking cultural tourism. Tourism Management Perspectives, 37, 100746.
Ridhotuloh, M., Sari, D., & Hidayat, T. (2024). Policy models in modern governance. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 77–92.
Ruhanen, L. (2022). Public value in sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 30(2), 321–338.
Sari, D. (2023). Tourism policy integration in Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Nasional, 7(1), 44–59.
Scott, N. (2020). Tourism experiences and stakeholder collaboration. Tourism Management, 76, 103954.

Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaringan pengaman sosial. Gramedia Pustaka Utama.

Tasci, A. D. A., & Semrad, K. (2021). Hospitality and tourist perception. Journal of Hospitality Marketing & Management, 30(5), 567–585.

United Nations World Tourism Organization. (2021). Tourism for rural development. UNWTO.

Walker, J. R. (2021). Introduction to hospitality management (8th ed.). Pearson.

Winter, S. C. (2020). Implementation perspectives: Status and reconsideration. Public Policy and Administration, 35(2), 123–145.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (6th ed.). Sage Publications.

Zhang, Y., Li, X., & Liu, Y. (2022). Rural tourism and economic development. Sustainability, 14(5), 2891.